

ISSN : 1858-4977

JIA

JURNAL ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO

Volume 6

Nomor 1

April 2010

M-090509

JIA

JURNAL ILMU ADMINISTRASI

Diterbitkan Oleh

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sam Ratulangi Manado

Ketua Penyunting

Prof. Dr. Patar Rumapea, M.Si

Wakil Ketua Penyunting

Drs. R. Johnly Pio, M.Si

Penyunting Pelaksana

Drs. Frendy A. O. Pelleng, M.Si

Drs. Lucky F. Tamengkel, MM

Dra. F. Daicy J. Lengkong, M.Si

Ir. Alvon Jusuf, MBA

Dewan Pakar

Prof. Dr. Umar Nimran, MA

(Guru Besar Universitas Brawijaya Malang)

Prof. Dr. J.G. Nirbito, M.Pd

(Guru Besar Universitas Negeri Malang)

Prof. Dr. Supriyanto, MM

(Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang)

Dr. Anang Kristyanto, MM

(Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya)

Drs. Agus Hermawan, M.Si, Mbus

(Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang)

Rokhedi Priyo Santoso, SE, MIDEc

(Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)

Pelaksana Tata Usaha

Johana Undap

Alamat Redaksi dan Tata Usaha: Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado 95115. Gedung a Lt. II Blok Barat. Telp. (0431) 862586 Fax. (0431) 862586

(JIA) Jurnal Ilmu Administrasi, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado diterbitkan sejak tahun 2005.

(JIA) Jurnal Ilmu Administrasi, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. Dekan : Drs. Johny Lumolos, M.Si. Pembantu Dekan I : Drs. M.R. Rembang, M.Si. Pembantu Dekan II : Drs. N.R. Pioh, M.Si. Pembantu Dekan III : Drs. W.A. Areros, M.Si. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi : Drs. S.M. Sumaiku, M.Si.

(JIA) Jurnal Ilmu Administrasi, terbit 3 kali dalam satu tahun pada bulan April, Agustus, dan Desember.

Dicetak oleh :

UNSRAT PRESS

Jl. Kampus Unsrat Manado 95115

Telp. 0431 - 863786 HP. 081356468558

JIA
JURNAL ILMU ADMINISTRASI
 Jurusan Ilmu Administrasi
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Sam Ratulangi Manado

Volume 6, Nomor 1

April 2010

DAFTAR ISI

- | | |
|--|----------------|
| <p>Pengaruh Perilaku Birokrasi Terhadap Kinerja Organisasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi Pada Sekretariat Kota Manado)
 <i>Arie J. Rorong</i></p> | <p>1 – 8</p> |
| <p>Pemberdayaan Perempuan Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Perbaikan Kondisi Sosial-Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sangihe)
 <i>Burhanuddin Kiyai</i></p> | <p>9 – 16</p> |
| <p>Kontribusi Kebijakan Pembangunan Sosial Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Miskin Perkotaan (Suatu Studi Di Kecamatan Tuminting Kota Manado)
 <i>Martha Ogotan</i></p> | <p>17 – 27</p> |
| <p>Analisis Hubungan Disiplin Dengan Prestasi Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara
 <i>Florence Daicy Jetty Lengkong, Patar Rumapea</i></p> | <p>25 – 31</p> |
| <p>Peran Aktif Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Sebagai Pedagang Eceran Ikan di Kecamatan Tuminting Kota Manado (Kasus Pelelangan Ikan di Kelurahan Tumumpa)
 <i>Roy F. Runtuwene</i></p> | <p>33 – 40</p> |
| <p>Analisis Penerimaan Pajak Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Daerah Kota Manado
 <i>Sonny G. Kaparang</i></p> | <p>41 – 44</p> |
| <p>Alternatif Kebijakan Penanganan Masalah Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Manado
 <i>Welson Yappy Rompas</i></p> | <p>45 – 51</p> |

Kontribusi Kebijakan Pembangunan Sosial Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Miskin Perkotaan (Suatu Studi Di Kecamatan Tuminting Kota Manado)

Martha Ogotan

Abstract: This research aimed to: (1) Describe the implementation of the social development policies for impoverished members of community in Tuminting district; (2) Describe the current living standard of impoverished members of community in Tuminting district; and (3) Discussed the contribution of the social development policies to the improvement of the standard of living of impoverished members of community in Tuminting district. Using a descriptive method, thirty-two (32) informants/respondents from various community elements who were recipients of the implementation process of the social development policies, P2KP or PKPS-BBM, were selected purposively in four sub-districts (administrative areas) in Tuminting district. Data and information were collected using interviews and questionnaires. The results were as followed: (1) In general, the implementation of the social development policies, especially the P2KP programs, had been quite effective, such as in the areas of infrastructure development, skills training for micro-industries, economic assistance for the elderly, etc. However, there were indications that the implementation processes had not been performed transparently, especially in relation to their financing. (2) The implementation of social development policies, especially the P2KP programs, had contributed considerably or realistically to the improvement of the standard of living of impoverished members of community, such as in providing job opportunities and enabling wider access for economic activities at neighborhood or sub-district (administrative area) level. (3) There had been improvements or changes to the standards of living of the members of community after the implementation of the Urban Poverty Eradication Programs (P2KP) and the Compensation Programs for the Reduction of Fuel Subsidies (PKPS-BBM), especially in the Tuminting district, Manado City. Based on the results, it was concluded that the implementation of the social development policies had been quite effective and had contributed significantly to the improvement of the living standard of impoverished members of community, as reflected in the narrower gap between standards of living in the community after the implementation of the policies.

Key Word: Policies Social Development, impoverished members of community

Fakta menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan berdimensi ekonomi atau pertumbuhan, memang memberi hasil yang cukup menggembirakan dalam kurun waktu lebih-kurang 3 dekade. Kenyataan itu ditandai dengan menurunnya secara drastis tingkat inflasi, sementara pertumbuhan ekonomi melejit mencapai $\pm 8,9\%$ sehingga oleh Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia bersama-sama dengan Korea Selatan, Thailand, Filipina, dan Malaysia (Moeljarto dan Prabowo: 1997); namun sayangnya menurut Tjokrowinoto (1987) kondisi tersebut tidak mengejawantahkan sepenuhnya realitas kehidupan

masyarakat; atau dengan istilah lain, belum sepenuhnya membawa perbaikan nasib kaum miskin. Sungguhpun demikian, sudah ada upaya untuk mengatasi kemiskinan sebagai perwujudan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan” (Abdul, 1997: 59). Sehubungan dengan hal tersebut, Effendi (2000) dan Darwin (1999) mengemukakan bahwa ada kebijakan yang mudah diimplementasikan, tetapi ada pula yang sulit diimplementasikan.

Mencermati fenomena tersebut, pemerintah melakukan tindakan korektif terhadap kebijakan pembangunan nasional, yaitu

Martha Ogotan adalah dosen Program Studi Adm Negara FISIP Unsrat

mengubah skala prioritas pembangunan yang lebih menitik-beratkan pada dimensi pemerataan ketimbang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini diikuiti dengan kebijakan Delapan Jalur Pemerataan yang menandai dimulainya era pembangunan sosial di Indonesia.

Kebijakan pembangunan sosial tersebut memberi output yang cukup signifikan, terutama dilihat dari perbaikan/peningkatan kualitas atau taraf hidup masyarakat, seperti perbaikan dibidang pendidikan dan pelayanan kesehatan serta status gizi masyarakat (Moeljarto dan Prabowo, 1997). Namun, dalam memasuki pertengahan Tahun 1997, krisis ekonomi yang melanda Indonesia membawa dampak negatif bagi perekonomian masyarakat sekaligus menyeret kondisi sosial-ekonomi yang semakin parah yang ditandai dengan bertambahnya jumlah dan kualitas kelompok masyarakat miskin.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah atas bantuan berbagai badan moneter internasional, meluncurkan beberapa kebijakan pembangunan bidang sosial-ekonomi yang dikenal dengan program "jaring pengaman sosial" (JPS), pemerintah juga mengalokasikan dana pengurangan subsidi BBM melalui program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM), yang membiayai beberapa program penanggulangan kemiskinan, antara lain: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Infrastruktur Pedesaan, Jaminan kesehatan (Askeskin), SLT dan untuk wilayah perkotaan diluncurkan program P2KP.

Berdasarkan hasil pengamatan dilokasi penelitian menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Kecamatan Tuminting sebagai penerima Askes-Kin sebanyak 5.220 RTM dengan jumlah Jiwa sebanyak 9.915 orang, sementara penerima Subsidi langsung tunai (SLT) untuk tahap I sebanyak 1.036 orang dan untuk tahap II, naik menjadi 1.613 orang. Dari data ini dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sosial belum menampakkan hasil yang optimal, terutama dilihat dari tujuannya, yaitu untuk memperbaiki/meningkatkan taraf hidup keluarga miskin.

Permasalahan tersebut menarik untuk dikaji lebih jauh melalui suatu penelitian, sehingga akan dapat diketahui hasil ataupun kontribusi daripada kebijakan pembangunan sosial yang dilaksanakan dalam menunjang upaya

perbaikan taraf hidup masyarakat perkotaan. Dengan diketahuinya hal tersebut maka akan dapat ditentukan langkah-langkah kebijakan yang perlu ditempuh kedepan ataupun diperbaiki untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan sosial dalam menunjang upaya perbaikan taraf hidup masyarakat miskin perkotaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, karena penulis ingin mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sosial yang berhubungan dengan kontribusi kebijakan pembangunan sosial, terhadap perbagikan taraf hidup masyarakat miskin perkotaan di kecamatan Tuminting Kota Manado.

Bertolak dari permasalahan penelitian dan kerangka acuan teori, maka penelitian ini dibatasi pada 2 (dua) konsep utama, yaitu: (1). Implementasi kebijakan pembangunan bidang sosial; (2). Kontribusi implementasi kebijakan pembangunan sosial terhadap taraf hidup masyarakat miskin.

Adapun definisi konseptual dan operasional, secara berturut-turut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pembangunan sosial. Adalah proses pelaksanaan program pembangunan bidang sosial bagi peningkatan taraf hidup masyarakat miskin kota dalam bentuk bantuan penanggulangan kemiskinan yang dananya bersumber dari program PKPS-BBM dan P2KP yang dananya bersumber dari bantuan Bank Pembangunan Asia. Implementasi kebijakan pembangunan bidang sosial diamati melalui beberapa indikator, antara lain : a). Persyaratan yang harus dipenuhi pihak pelaksana program (sekolah, pemerintah kelurahan, masyarakat penerima manfaat) untuk mendapatkan program tersebut. b). Kriteria yang harus dipenuhi masyarakat /keluarga miskin sebagai penerima manfaat program (kelompok sasaran). c). Ketepatan waktu pencairan dana bantuan program. d). Mekanisme pelaksanaan program, mulai dari proses perencanaan sampai tahap evaluasi program. e). Ketepatan jumlah dana bantuan yang diterima, baik oleh pelaksana program maupun oleh keluarga miskin. f). Ketepatan penggunaan bantuan program, baik untuk infrastruktur, BOS, SLT, Raskin, maupun JKKM. g). Transparansi pengelolaan bantuan program oleh

pelaksana program. h). Evaluasi pelaksanaan program.

2. Kontribusi kebijakan.

Pengertian dari kontribusi kebijakan adalah sumbangan pelaksanaan kebijakan pembangunan sosial dalam rangka menanggulangi kemiskinan masyarakat terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat miskin. Konsep ini diamati melalui dua aspek, yakni aspek kontribusi dan kondisi taraf hidup masyarakat antara sebelum dan sesudah diimplementasikannya kebijakan pembangunan sosial.

a. Kontribusi implementasi kebijakan diamati melalui beberapa komponen, antara lain: 1). Terpenuhinya tingkat kebutuhan masyarakat yang telah direncanakan dari jumlah dana bantuan yang diterima. 2). Terserapnya tenaga lokal dalam proses pelaksanaan program. 3). Tingkat kecukupan dana bantuan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat miskin. 4). Tingkat keluhan masyarakat terhadap proses pelaksanaan program.

b. Kondisi taraf hidup masyarakat antara sebelum dan sesudah implementasi kebijakan pembangunan sosial, diamati melalui beberapa indikator : 1). Kebutuhan dasar minimum, datanya diperoleh melalui tingkat konsumsi keluarga, pakaian (sandang), perumahan. 2). Kebutuhan sosial-psikologis, datanya diperoleh dari : pendidikan (formal, non-formal), interaksi sosial, baik internal dalam keluarga maupun eksternal diluar lingkungan keluarga. 3). Kebutuhan perkembangan, datanya diperoleh dari: tabungan, informasi, transportasi dan lain-lain. 4). Kebutuhan sosial kemasyarakatan, datanya didapat dari: tingkat partisipasi/sumbangan, keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan/keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Teknik yang akan digunakan dalam rangka pengumpulan data adalah teknik studi pustaka, observasi lapangan dan wawancara mendalam yang diarahkan pada fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, keseluruhan data dan informasi yang telah terkumpul akan dikelompokkan dan disusun secara sistimatis untuk siap dianalisis melalui beberapa teknik dan pendekatan, yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi konsep/variabel penelitian, digunakan teknik analisis tabel frekuensi (persentase) dan digambarkan pula melalui grafik.
2. Untuk mengetahui ada-tidaknya kontribusi implementasi kebijakan pembangunan sosial terhadap taraf hidup masyarakat, digunakan pendekatan analisis perubahan sosial. Penerapan pendekatan analisis perubahan sosial akan difokuskan pada aspek peningkatan/perubahan taraf hidup masyarakat miskin perkotaan sebagai dampak/kontribusi dari implementasi kebijakan pembangunan bidang sosial - terkait bidang ekonomi masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Sosial

Variabel ini dikonsepsikan sebagai proses pelaksanaan program pembangunan bidang sosial bagi peningkatan taraf hidup masyarakat miskin kota dalam bentuk bantuan penanggulangan kemiskinan yang dananya bersumber dari program PKPS-BBM dan P2KP yang dananya bersumber dari bantuan Bank Pembangunan Asia.

Berdasarkan hasil pengumpulan data terhadap 32 responden, diperoleh gambaran tentang distribusi frekuensi untuk variabel implementasi kebijakan pembangunan bidang sosial di Kecamatan Tuminting sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Variabel Implementasi Kebijakan Pembangunan Sosial Di Kecamatan Tuminting

No.	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi		
			Abs (f)	Rel (%)	Kum (%)
1	Rendah	20 - 22	8	25.0	25.0
2	Sedang	23 - 25	7	21.9	46.9
3	Tinggi	26 - 29	17	53.1	100.0
Jumlah			32	100.0	

Gambaran hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa secara umum, proses implementasi kebijakan pembangunan bidang sosial, terutama berkaitan dengan program-program penanggulangan kemiskinan seperti program pembangunan infrastruktur, subsidi langsung tunai atau

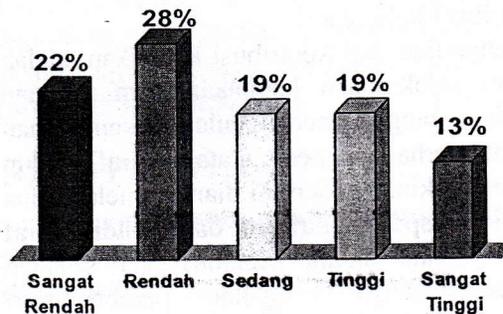
BLT, asuransi kesehatan keluarga miskin (askes-kin), bantuan beras miskin (Raskin) dan program-program P2KP berjalan lancar dan efektif. Hal ini diindikasikan dengan sebagian besar penilaian responden terhadap implementasi kebijakan tersebut berada pada kategori tinggi pada kelas interval : 26 – 29 atau berada di atas skor rata-rata, yakni sebesar 25.

Hasil penelitian ini dibenarkan oleh informan H.S (Aparat pemerintah Kecamatan Tuminting) dengan mengatakan bahwa pada prinsipnya, semua program pembangunan bidang sosial, baik yang bersumber dari dana PKPS-BBM maupun dari P2KP yang dialokasikan di hampir semua kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tuminting, dapat terealisasi dengan baik, walaupun ada beberapa substansi proses implementasi program yang mungkin belum memuaskan, baik bagi pelaksana program maupun masyarakat penerima manfaat program tersebut” (Hasil Wawancara, Maret 2008).

Sinyalemen informan (H.S) tersebut dibenarkan pula oleh beberapa informan lainnya, baik dari aparat pemerintah kelurahan, pelaksana program maupun dari unsur pengurus LPM dan tokoh masyarakat yang pada prinsipnya berpendapat bahwa masih terdapat kontroversi penentuan kriteria keluarga miskin yang ditemukan pada saat pendataan yang kurang melibatkan aparat setempat. Kurang sesuai dengan kriteria penerima manfaat program, tampaknya dipengaruhi oleh faktor pendataan yang tidak akurat, karena kurang melibatkan aparat kelurahan. Lebih lanjut, menurut informan (YDU) dari unsur masyarakat pemanfaat, bahwa “Penetapan kriteria keluarga miskin akan lebih sesuai apabila ada kerjasama dengan pemerintah setempat, minimal kepala lingkungan, karena pendataan keluarga miskin dilakukan oleh orang luar yang tidak mengerti seluk beluk penduduk setempat, maka hasilnya kurang akurat (Hasil wawancara, Maret 2008).

Hasil-hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil tabulasi data untuk indikator tingkat pemenuhan kriteria penerima bantuan sebagaimana tervisualisasi pada Gambar 1.

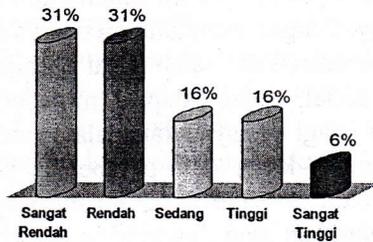
Gambar 1. Proporsi Jawaban Responden Tentang Tingkat Pemenuhan Kriteria Program



Distribusi jawaban responden, mengindikasikan bahwa tingkat pemenuhan kriteria penerima bantuan program bidang sosial lebih didominasi oleh kategori rendah dan sangat rendah sebesar 50%, sementara terkategori tinggi dan sangat tinggi hanya sebesar 32 % saja. Kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa walaupun secara umum, implementasi kebijakan/program bidang sosial berjalan sesuai rencana, namun dari sisi tingkat pemenuhan kriteria penerima program belum mencapai sasaran yang optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah masalah transparansi pengelolaannya yang belum mendapat perhatian serius, baik dari pihak pengelola program itu sendiri, termasuk pemerintah, maupun dari lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) serta unsur terkait lainnya.

Hasil wawancara dengan beberapa informan terungkap bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program yang paling rendah adalah program P2KP. Salah satu kelemahan yang sangat menonjol dalam pengelolaan program pembangunan bidang sosial, khususnya pada tingkat implementasi/proses pelaksanaannya ialah masalah transparansi, terutama menyangkut pengelolaan keuangan atau dana program/proyek bantuan P2KP. Realitas ini diperlihatkan melalui hasil analisis data yang dideskripsikan pada Gambar 2, di mana proporsi tanggapan responden didominasi oleh kategori rendah dan sangat rendah sebesar 62%, sementara kategori tinggi dan sangat tinggi hanya sebesar 22 %.

Gambar 2. Proporsi Jawaban Responden Tentang Tingkat Transparansi Dalam Pengelolaan Program Pembangunan Bidang Sosial



Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana bantuan P2KP juga tercermin dari kondisi proyek fisik yang dibangun, tampaknya asal jadi dan menggunakan material yang kurang berkualitas, seperti penutup saluran air (selokan), pengeboran air bersih untuk umum, bak sampah (TPS) dan penerangan lampu jalan, pembuatan jalan Setapak (tangga-tangga), jalan lorong/lingkungan di kelurahan Sindulang Satu dan Bitung Karangria, yang menelan dana P2KP masing-masing kelurahan sebesar 250 juta rupiah (Gambar 3).

Kurangnya transparansi pengelolaan keuangan proyek/program P2KP dan SLT tercermin pula dari keluhan beberapa informan, baik dari tokoh masyarakat maupun masyarakat pengguna program, di antaranya, menurut informan (YDU) dari unsur masyarakat pemanfaat, dengan mengatakan bahwa banyak terjadi keluhan masyarakat mengenai penyaluran dana SLT, antara lain : penyaluran yang tidak tepat sasaran, penduduk tetap tergolong keluarga miskin tidak di data dan tidak melibatkan pemerintah dalam hal pendataan (Hasil wawancara, Maret 2008).

Selanjutnya, informan (SRP) dari kelurahan Maasing mengatakan bahwa "Yang menjadi keluhan kami adalah memohon kepada pihak-pihak yang terkait di dalam pelaksanaan proyek P2KP agar kiranya kedepan harus lebih akuntabel di dalam mengelola uang rakyat atau uang negara, karena sikap tertutup yang selama ini diperlihatkan oleh pelaksana dan pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait di dalam pengelolaan proyek masyarakat ini telah membuat resah warga masyarakat setempat karena kurangnya transformasi atau sosialisasi ke masyarakat, karena apapun yang terjadi - uang ini

yaitu uang Negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama dan uang rakyat Maasing. Jadilah pengelola proyek yang berani bertanggungjawab atas apapun yang terjadi (Hasil wawancara, Maret 2008).

Mengacu pada hasil-hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan sementara bahwa walaupun proses pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang sosial, khususnya pelaksanaan program/proyek P2KP dan PKPS-BBM di Kecamatan Tuminting cukup efektif, namun masalah transparansi kurang mendapat perhatian dari tim pelaksana/pengelola kegiatan program/proyek dimaksud.

A. Kontribusi Kebijakan Pembangunan Sosial terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Miskin

Permasalahan yang akan dijawab pada bagian ini yaitu "apakah implementasi kebijakan pembangunan sosial dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat miskin di Kecamatan Tuminting"? Untuk menjawab permasalahan tersebut, telah dilakukan pengumpulan data terhadap 32 responden/informan dari berbagai unsur dalam masyarakat yang terdistribusi ke dalam empat kelurahan. Dengan menerapkan metode dan teknik pengumpulan dan analisis data yang sama, diperoleh gambaran mengenai ada-tidaknya kontribusi pelaksanaan program bantuan bagi masyarakat miskin terhadap peningkatan taraf hidup keluarga mereka, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Kontribusi Implementasi Kebijakan Pembangunan Sosial Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Miskin

No.	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi		
			Abs (f)	Rel (%)	Kum (%)
1	Rendah	6 - 7	6	18.8	18.8
2	Sedang	8 - 9	15	46.9	65.6
3	Tinggi	10 - 12	11	34.4	100.0
Jumlah			32	100.0	

Rata-rata tanggapan responden tentang adanya kontribusi pelaksanaan program pembangunan sosial terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat miskin berada pada kategori sedang (45%) cenderung tinggi (34,4%),

sementara hanya sekitar 19% terkategori rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang sosial, khususnya kebijakan PKPS-BBM dan P2KP yang diimplementasikan di setiap kelurahan dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat miskin sebagai penerima manfaat program tersebut.

Hasil penelitian ini setidaknya dibenarkan oleh beberapa informan, seperti informan (S.Sy) dari unsur aparat Kelurahan Bitung Karangria, yang mengatakan bahwa "dengan adanya dana bantuan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di kelurahan kami, seperti memenuhi kebutuhan akan air bersih, akses jalan, memberdayakan para ibu rumah tangga melalui latihan keterampilan pembuatan kue, membantu ekonomi para lanjut usia (Lansia), dan lain-lain (Hasil wawancara, Maret 2008). Namun menurut Informan (SRP) dari unsur aparat Kelurahan Maasing, bahwa program subsidi langsung tunai (SLT) belum dapat memenuhi tuntutan hidup keluarga miskin, dikarenakan biaya belanja rumah tangga pada belakangan ini semua serba naik termasuk sembilan bahan pokok dan semua ini adalah imbas dari kenaikan harga BBM di dalam kurun waktu yang relatif singkat. Lebih lanjut dikatakan bahwa, untuk dana yang diterima per triwulan mungkin hanya dapat dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok atau kebutuhan penunjang lainnya yang saya tidak dapat jelaskan secara detail pembelanjannya. Menurut informan (M), dana bantuan/subsidi langsung tunai yang diterima keluarga miskin dapat dibelanjakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, seperti :beras dan lauk-pauk, itu pun tidak cukup untuk satu bulan sedangkan BLT turun setiap 3 bulan dan sering ditunda-tunda waktunya (Hasil wawancara, Maret 2008).

Tampaknya hasil penelitian ini dapat membedakan kontribusi antar substansi kebijakan, di mana program bantuan sosial berupa SLT sebagai bagian dari kebijakan PKPS-BBM tampaknya kurang efektif dan belum memberikan kontribusi yang berarti bagi penanggulangan kemiskinan, khususnya peningkatan taraf hidup

masyarakat miskin, sementara program P2KP yang dananya bersumber dari bantuan Bank Pembangunan Asia, cukup signifikan memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat miskin. Simpulan ini dibenarkan oleh Lurah Tuminting, dengan mengatakan bahwa :

"P2KP merupakan salah satu kebijakan pembangunan sosial yang dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pemberian akses yang lebih luas bagi aktivitas ekonomi masyarakat pada tingkat kelurahan dan lingkungan, terutama bagi masyarakat miskin yang tinggal di pinggiran kota. Hal penting dan perlu ditekankan disini bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) selaku lembaga yang dipercayakan untuk mengelola kegiatan P2KP benar-benar harus memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga mampu merumuskan rencana-rencana/program-program atau kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama bagi keluarga miskin" (Hasil wawancara, Maret 2008).

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan model kebutuhan sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dikemukakan oleh Soedjatmiko (1998) antara lain : dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif (termasuk menciptakan sendiri) yang memungkinkan adanya balas jasa setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hasil penelitian ini berimplikasi perlu dipertahankan dan ditingkatkan kebijakan pembangunan sosial, khususnya program-program yang langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, namun dilakukan secara transparan dan akuntabel pada tingkat pengelola program/proyek tersebut.

B. Kondisi Taraf Hidup Masyarakat Miskin Antara Sebelum dan Sesudah Implementasi

Untuk mengetahui lebih jelas tentang ada-tidaknya sumbangsih/ kontribusi implementasi kebijakan pembangunan bidang sosial terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perlu dilakukan analisis perubahan sosial terhadap kondisi taraf hidup masyarakat miskin antara sebelum dan sesudah diimplementasikannya kebijakan pembangunan sosial tersebut.

Untuk maksud tersebut, dan dengan mengacu pada indikator variabel taraf hidup masyarakat miskin (Bab III), maka dijabarkan kedalam daftar pertanyaan (kuesioner) dari masing-masing indikator pokok sebanyak 4 (empat) item pertanyaan/ Pernyataan sehingga jumlah keseluruhan pertanyaan/ Pernyataan untuk variabel ini sebanyak 16 butir, kemudian diskoring berdasarkan skala likert dan diolah/dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis perubahan sosial, yang hasilnya menunjukkan bahwa secara umum terjadi perubahan rata-rata taraf hidup masyarakat miskin setelah diimplementasikannya kebijakan pembangunan sosial, yakni berubah atau naik sebesar 6,5%. Fakta ini menunjukkan bahwa perubahan tertinggi (9,8%) terjadi pada komponen pemenuhan kebutuhan dasar umum, yaitu konsumsi (pangan) 11,8%, sandang (pakaian) terutama pakaian seragam sekolah anak sebesar 16,9%, kesehatan dan gizi sebesar 8,8% dengan menggunakan kartu Gakin (Askes-kin) dan perumahan (papan) hanya sebesar 1,9%. Sedangkan rata-rata perubahan pemenuhan kebutuhan perkembangan hanya sebesar 3,2% yang meliputi : tabungan (arisan dan simpanan) dan informasi, masing-masing sebesar 3,1%, transportasi sebesar 2,5 dan pemenuhan kebutuhan rekreasi/hiburan sebesar 3,8%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan taraf hidup masyarakat miskin dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan sosial-psikologis, pemenuhan kebutuhan perkembangan dan pemenuhan kebutuhan sosial kemasyarakatan antara sebelum dan sesudah diimplementasikannya kebijakan pembangunan bidang sosial dalam bentuk pelaksanaan program-program P2KP, seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan ibu-ibu dalam pembuatan kue, bantuan ekonomi kelompok lanjut usia, bantuan modal usaha bagi kelompok usaha produktif dan program-program PKPS-BBM, seperti: pembangunan infrastruktur, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan dana operasional sekolah (BOS), bantuan jaminan kesehatan keluarga miskin (JKKM) atau asuransi kesehatan keluarga miskin dan bantuan beras miskin (Raskin).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Secara umum, pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang sosial cukup efektif, terutama program-program P2KP, seperti pembangunan infrastruktur (perbaikan jalan lingkungan, drainase, tempat pembuangan sampah, pengadaan air bersih), pelatihan keterampilan membuat kue bagi ibu-ibu rumah tangga dari keluarga miskin, bantuan ekonomi bagi lansia, dan lain-lain. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya terindikasi belum dilakukan secara transparan, terutama berkaitan dengan masalah keuangan.
2. Implementasi kebijakan pembangunan bidang sosial terutama program-program P2KP memberikan kontribusi yang cukup berarti atau nyata terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat miskin, seperti membuka lapangan kerja dan menciptakan akses yang lebih luas bagi aktivitas ekonomi masyarakat, baik pada tingkat lingkungan maupun kelurahan.
3. Terdapat peningkatan atau perubahan taraf hidup masyarakat miskin setelah diimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) maupun program-program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM), khususnya di wilayah kecamatan Tuminting Kota Manado.

Saran

Berkaitan dengan hasil temuan dalam penelitian ini, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai solusi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pembangunan sosial, seperti P2KP dan PKPS-BBM perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga dengan kenaikan harga BBM dewasa ini akan membantu masyarakat miskin untuk memenuhi atau paling tidak dapat

mempertahankan kondisi taraf kehidupan keluarganya.

2. Untuk mencapai tingkat efektivitas yang tinggi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan sosial, khususnya program P2KP dan PKPS-BBM kedepan, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu, terutama organisasi pengelola program sehingga dapat menjamin tingkat transparansi dan akuntabilitasnya. Selain itu, pendataan keluarga miskin sebagai kelompok penerima manfaat program, hendaknya melibatkan secara langsung aparat pemerintah kelurahan dan lingkungan serta tokoh masyarakat setempat, karena merekalah yang lebih mengetahui kondisi masyarakat/keluarga miskin.
3. Diperlukan adanya penelitian lanjutan bagi mereka yang peduli terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga kriteria keluarga miskin dapat teridentifikasi, baik di pedesaan maupun di perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, W. S., 1997, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Darwin, M., 1999, *Implementasi Kebijakan, Modul Pelatihan Teknik dan Manajemen Kebijakan Publik UGM*, Yogyakarta.
- Effendi, S., 2000, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. UGM*, Yogyakarta.
- Moeljarto, V. dan S. Prabowo, 1997, *Bidang Pendidikan dan Kesehatan Dalam Pembangunan Sosial*, Dalam Analisis CSIS Tahun XXVI No. I Januari-Februari 1997.
- Soedjatmiko. 1998. Model Kebutuhan sebagai Strategi. Rajawali. Jakarta.
- Tjokrowinoto, M., 1987, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, PT. Tiara Wacana, Jakarta.